

Analisis Hadis Wali Nikah dan Aktualisasi Hukumnya dalam Konteks Gorontalo

Dulsukmi Kasim

(Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)

dulsukmikasim@iaingorontalo.ac.id

Abstract

The legal content contained in the marriage guardian's traditions shows the cancellation of a marriage that takes place without permission, *taukil* or the presence of the guardian. Even if there is a marriage that takes place without the presence of a guardian, permission or *taukil* from her, the marriage does not abort the woman's right to dowry even though her marital status is categorized as invalid or null and void by the Shari'a and statutory law.

If the legal guidance from the hadith is actualized in the context of the marriage that took place in Gorontalo, it shows that Gorontalo people's awareness about the function and position of guardians in marriage is still very weak. There are a lot of practices of unregistered marriage services or unofficial marriage services, both which are carried out openly or in secret, both in Gorontalo City and in the district. Likewise, the practice of *Sirri* marriage in Gorontalo City which in context also indicates the weak awareness of the public about the existence of guardians in marriage.

Abstrak

Kandungan hukum yang terdapat dalam hadis-hadis wali nikah menunjukkan batalnya suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa izin, *taukil* atau kehadiran wali. Kalaupun ada pernikahan yang berlangsung tanpa kehadiran wali, izin atau *taukil* darinya, pernikahan tersebut tidak menggugurkan hak wanita atas mahar meski status pernikahannya dikategorikan tidak sah atau batal oleh syariat dan hukum perundang-undangan.

Jika petunjuk hukum dari hadis tersebut diaktualisasikan pada konteks pernikahan yang terjadi di Gorontalo menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Gorontalo tentang fungsi dan kedudukan wali dalam pernikahan masih sangat lemah. Banyaknya terjadi praktek layanan nikah tidak tercatat atau layanan jasa nikah tidak resmi, baik yang dijalankan secara terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, baik di Kota Gorontalo maupun di kabupaten. Demikian pula halnya dengan masih maraknya terjadi praktik nikah sirri di Kota Gorontalo yang secara konteks juga mengindikasikan masih lemahnya kesadaran masyarakat tentang eksistensi wali dalam pernikahan.

Keyword: *Aktualisasi, Hadis, Wali Nikah.*

Pendahuluan

Menjaga keturunan atau kehormatan adalah salah satu bagian utama yang tercakup dalam tujuan pokok hadirnya hukum dan syariat Tuhan di bumi. Meski berada pada posisi keempat di bawah agama, jiwa, dan akal, namun kehadirannya sangatlah dibutuhkan oleh manusia demi terwujudnya dan berkesinambunannya peradaban. Salah satu term yang terkandung dalam maqashid ini adalah ajaran tentang perkawinan yang di dalam terminologi Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut sebagai akad/ ikatan yang kuat atau *mitsaqan galidzhan* antara seorang pria dan wanita.

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan masalah perkawinan ini. Selain memerintahkan umatnya menikah juga melarang membujang atau berprinsip tidak mau menikah dan mengikuti pola hidup para biksu, pendeta, atau biarawan/biarawati yang ada di agama nasrani. Sebagai bukti keseriusan persoalan ini dalam pandangan agama, sampai-sampai pembicaraannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah demikian kompleks dan rinci.

Bila coba ditelusuri dalam Al-Qur'an, maka menurut perhitungan yang dilakukan oleh Abdul Wahab Khallaf sebagaimana dikutip oleh Mohammad Daud Ali, dari 228 ayat-ayat hukum tercantum dalam Al-Qur'an, 70 ayat di antaranya merupakan ayat

hukum yang berkenaan dengan keluarga, termasuk di dalamnya perkawinan.¹

Berbeda dengan Al-Qur'an, jumlah hadis yang berbicara tentang masalah pernikahan jauh berkali lipat lebih banyak dari ayat Al-Qur'an. Makanya, tidak heran kalau pembahasan mengenai nikah dalam kajian fikih/hukum Islam telah membentuk cabang tersendiri yang terpisah dari pembahasan lainnya yang biasanya disebut dengan fikih munakahat. Artinya, teknis dan rincian persoalan nikah yang disinggung dalam Al-Qur'an lebih banyak dijelaskan lewat hadis Nabi.

Mendalami persoalan nikah dan hal-hal lain yang terkait dengan teknis pelaksanaannya lebih tepat jika dikaji melalui untaian hadis-hadis Nabi yang tersebar dalam kitab kumpulan hadis. Selain dapat menghasilkan gambaran suatu persoalan secara komprehensif, upaya tersebut juga dapat membantu para cendekiawan dan pembelajar agar bisa sampai pada analisis isi kandungan pesan Nabi sesuai konteks dan peristiwa riil yang mengitari suatu ketentuan hukum dalam pernikahan. Baik, waktu, tempat, aktor, budaya, lingkungan, serta suasana ketika dikeluarkannya suatu hadis. Di situlah letak urgensi penelitian dan kajian hadis-hadis dari Nabi saw.

Berdasarkan posisi tersebut, wali yang merupakan salah satu elemen utama dalam terwujudnya suatu pernikahan dalam Islam tentu sangat relevan jika dikaji dari perspektif hadis Nabi saw, dengan suatu harapan akan dapat memberi gambaran utuh mengenai aturan teknis sistem perwalian nikah yang valid menurut ketentuan Islam. Apalagi mengingat posisi al-Sunnah sebagai sumber hukum sekunder dalam Islam dan sebagai *bayān* terhadap Al-Qur'an.

Wali Tujuannya dalam Pernikahan

Dalam kitab *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, term *wali* diartikan dengan *al-qurb* yang berarti dekat atau kerabat, pemelihara, pelindung, pengasuh.² Sedangkan dalam buku *Lisan al-'Arab* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wali adalah seseorang yang sangat memiliki peranan penting dan mendasar karena sebuah akad nikah dianggap tidak sah tanpa wali.³ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata wali memiliki beberapa arti: (1) wali yang

¹Lihat, Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 2.

²Lihat Abi al-Husain bin Faris bin Zakariyya, *Maqāyis al-Lughah*, Juz. V (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), h. 141.

³Lihat Abi al-Fadhil Jamal al-Din Muhammad ibn Muharram ibn Mansur, *Lisan al-'Arab*, Jilid. XV (Beirut: Dar al-Sadir, t. th.), h. 407.

mengurus anak yatim piatu dan hartanya; (2) wali nikah; (3) wali Allah; (4) wali sebagai kepala pemerintahan; dan lain-lain.⁴

Secara operasional para ahli telah memberikan pengertian wali nikah itu sendiri. Rahmat Hakim misalnya, memberi pengertian wali nikah sebagai “orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki”.⁵ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, wali nikah ialah pengasuh pengantin perempuan pada ketika nikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).⁶

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, dapat difahami bahwa wali nikah merupakan salah satu unsur utama dalam perkawinan seseorang. Apabila dikatakan bahwa wali merupakan orang yang berhak untuk mengadakan atau mengikatkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki dalam suatu ikatan perkawinan, maka hal itu disebabkan karena orang tersebut secara nasab dekat hubungannya dengan perempuan yang diberi perwalian. Karena itu orang yang jauh hubungannya secara nasab apalagi tidak memiliki hubungan dengan perempuan yang dikawinkan, tidak dapat menjadi walinya.

Menurut Islam, satu-satunya orang yang boleh mengambil-alih wewenang perwalian dalam perkawinan seseorang, adalah pemerintah (*sulthan*), itupun apabila semua orang-orang yang berhak menjadi wali secara hukum dinyatakan tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau menyatakan diri enggan menjalankan posisi dan kedudukannya.

Tujuan utama dari keberadaan wali dalam pernikahan sebagaimana difahami dari bunyi hadis Nabi adalah untuk menikahkan pengantin wanita dengan pengantin pria.⁷ Selain itu, keberadaan wali nikah dalam pernikahan juga difahami secara filosofis sebagai bentuk penyerahan/pengalihan tanggung jawab penuh secara formal (sosial dan agama) dari pihak keluarga kepada sang calon suaminya dalam membina, mengurus, menafkahi, dan melindungi sang wanita. Dalam hal ini, wali bertindak sebagai wakil

⁴W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985), h. 1146-1147.

⁵Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 59.

⁶W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 1147.

⁷Fungsi dan tujuan wali nikah ini difahami dari teks hadis yang diperoleh dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا الْمَرْأَةِ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِي....

Berdasarkan kalimat “يُنْكَحْهَا الْوَالِي” yang berarti wanita dinikahkan oleh wali maka jelaslah bahwa tujuan dan fungsi utama wali adalah menikahkan mempelai wanita dengan mempelai pria.

dari seluruh keluarga besar mempelai wanita untuk mengikatkan dirinya dalam tali perkawinan dengan calon suaminya.

Sedemikian penting peran dan fungsi wali dalam perkawinan sehingga apabila wali pada urutan yang lebih tinggi kedudukannya tidak ada, atau tidak hadir, atau tidak dapat menyatakan pendapat, maka wali pada urutan yang lebih rendah kedudukannya yang akan menggantikannya. Bahkan apabila semua wali dari semua tingkatan tidak ada, tidak hadir atau tidak dapat menyatakan pendapat, maka hak perwalian pindah kepada pemerintah atau kepala negara (*sulthan*).⁸ Hal ini sekaligus menjadi pesan bahwa dengan adanya mekanisme pengaturan seperti itu dalam agama menunjukkan wajibnya izin dan kehadiran wali dalam pernikahan.

Pembagian Wali

Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan informasi secara rinci yang menyebutkan siapa yang berhak menjadi wali dalam perkawinan. Demikian pula halnya dalam hadis. Meski demikian, dalam beberapa hadis Nabi ditemukan redaksi yang mengisyaratkan dan menyebut dua jenis wali. Pertama adalah bapak.⁹ Dan kedua adalah *Sulthan*.¹⁰

Dari isyarat itulah kemudian dikenal adanya dua macam wali dalam pernikahan, yaitu wali nasab dan wali hakim. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah wali adalah kerabat mempelai wanita melalui dua jalur, yaitu (1) faktor *Ashabah* dan (2) faktor *Nasab*.¹¹ Dalam hal ini wali nasab adalah anggota keluarga calon mempelai wanita yang mempunyai hubungan darah *patrilineal* (langsung/paling dekat/paling kental) dengan calon mempelai wanita dan hanya yang berjenis

⁸Sebagaimana redaksi hadis: فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَوَلِيٌّ مَنْ لَا وَوَلِيٌّ لَهُ. Lihat, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 1 (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th), h. 605. (Hadis No. 1880 "Bab La Nikaha Illa biwaliyy")

⁹Teks hadisnya adalah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ شَعْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقُضَيْلِ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ: «الْوَالِيُّ أَحَىٌّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تَسْتَأْذِنُهَا أَبُوَّهَا».

Kata "أبوها" artinya bapak dari gadis/wanita yang akan dinikahkan. Lihat, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistaniy, *Sunan Abi Daud*, Juz. 2 (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, t.th), h. 229. (Hadis No. 2099, "Bab fi al-Waliyy")

¹⁰ Teks hadisnya adalah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا امْرَأَةٌ لِمَ يَنْكِحُهَا الْوَالِيُّ فَيَكَاخُهَا بَاطِلٌ فَيَكَاخُهَا بَاطِلٌ فَيَكَاخُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَوَلِيٌّ مَنْ لَا وَوَلِيٌّ لَهُ.

Kata "السلطان ولي" artinya sulthan/pemerintah adalah termasuk kategori wali. Dan inilah biasanya yang disebut dengan wali hakim. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, h. 605. (Hadis No. 1880 "Bab La Nikaha Illa biwaliyy")

¹¹Lihat, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *'Aunu al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud*, Juz. VI (Cet. III; t.t.: al-Maktabath al-Islamiyyah, 1979), h. 98.

kelamin laki-laki.¹² Atau meminjam istilah Juhur Ulama, seperti Imam Malik dan Imam al-Syafi'i bahwa wali itu adalah ahli waris si perempuan yang diambil dari garis nasab ayah, bukan dari garis nasab ibunya.¹³ Adapun orang-orangnya dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Ayah;
- 2) Kakek (ayah dari ayah);
- 3) Saudara laki-laki seibu seapak atau seapak saja;
- 4) Saudara laki-laki ayah (paman);
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau seapak saja;
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu);
- 7) Paman dari bapak;
- 8) Anak laki-laki dari paman dari bapak;
- 9) Paman dari kakek;
- 10) Anak laki-laki dari paman dari kakek.¹⁴

Dalam teknis pelaksanaannya, wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas dan tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab atau lebih dekat dan kuat hubungan darahnya. Apabila ada wali yang terdekat hubungan darahnya dan hadir pada saat akad nikah berlangsung, maka perkawinan tidak boleh dilakukan oleh wali yang lebih jauh, kecuali kalau wali akrab tersebut oleh karena suatu sebab tidak dapat bertindak sebagai wali. Tetapi jika wali akrab gaib, tidak ada di tempat dan tidak tentu rimbanya, Imam Hanafi berpendapat, hak kewaliannya berpindah kepada wali urutan berikutnya.¹⁵

Pada prinsipnya kewenangan untuk menjadi wali hakim ada pada Kepala Negara (*sulthan*), namun karena secara teknis kewenangan itu tidak mungkin kalau dilakukannya sendiri mengingat tugas Kepala Negara yang banyak (baik ke dalam maupun keluar) dan banyaknya warga negara yang harus dilayani apabila dalam perkawinannya tidak mempunyai wali, menyebabkan kewenangannya sebagai wali hakim itu didelegasikan kepada pejabat yang lebih rendah. Dengan demikian, wali hakim ialah orang yang

¹² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), h.65.

¹³Lihat, Imam Abu Abdillah Mohammad Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid IV (t.t.: t.p., 1968), h. 248.

¹⁴Lihat, Imam Abu Abdillah Mohammad Idris al-Syafi'iy, *al-Umm*, h. 248.

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 60. Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah, *Al-Ulum*, Vol. 19 No 1, June 2019, h. 1-26

diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.¹⁶

Dalam pelaksanaannya, tentu tidak sama tiap-tiap negara. Indonesia misalnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987, yang ditunjuk sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tidak ada orang lain di luar pejabat itu yang boleh menjadi wali hakim. Di zaman modern dewasa ini, meskipun jarak *masafat al-qasri* telah terpenuhi, untuk akad nikah kepada wali perlu diberitahukan terlebih dahulu.

Kapan Kepala Negara, sultan, atau pejabat yang ditunjuk dapat bertindak menjadi wali hakim? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa apabila semua wali dari daftar urutan wali nasab sudah tidak ada atau ada tetapi tidak dapat menyatakan pendapatnya atau *adhal* atau *gaib*, maka hak untuk menjadi wali dalam suatu perkawinan pindah kepada wali hakim.¹⁷ Tetapi Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila wali nasab (wali nasab urutan pertama atau wali mujbir) *gaib*, tidak menyebabkan berpindahnya hak kewaliannya kepada wali urutan berikutnya, melainkan langsung jatuh kepada wali hakim.¹⁸

Landasan Normatif Wali dalam Pernikahan

Persolan wali nikah telah diatur secara normatif dalam kehidupan manusia. Hal itu berlandaskan pada beberapa sumber hukum sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang secara tidak langsung menisyratkan eksistensi dan wewenang wali dalam pernikahan, di antaranya: QS. al-Baqarah: 234; QS. al-Baqarah: 232; QS. al-Baqarah: 221; QS. an-Nur: 32. Menurut imam al-Qurthuby, objek yang dituju oleh khitab atau titah atau perintah dalam kalimat (وَأَنْكِحُوا) dalam an-Nur: 32 di atas ditujukan kepada para wali nikah. Sebab seandainya ditujukan kepada para suami atau istri maka lafad tersebut tidak menggunakan huruf hamzah di awalnya. Olehnya itu, ayat ini merupakan dalil bahwasanya wanita tidak memiliki hak untuk menikahkannya sendiri tanpa izin/restu dari wali.¹⁹

¹⁶ Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 86.

¹⁷ Lihat, Abd al-Rahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz. IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), h. 89.

¹⁸ Abd al-Rahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, h. 90.

¹⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*, Juz. 15 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), h. 229.

2. Hadis

Dalam hadis Nabi dapat dijumpai banyak hadis-hadis yang melandasi keberadaan wali dalam pernikahan. Salah satu di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ.²⁰

Artinya:

Dari Muhammad bin Qudamah bin A'yun kami diceritakan oleh Abu Ubaidah al-Haddad dari Yunus dan Israil dari Abi Ishak dari Abi Burdah dari Abi Musa bahwasanya Nabi saw bersabda tidak (sempurna/sah) suatu pernikahan kecuali dengan (kehadiran/izin) wali.

Hadis ini bersama dengan hadis-hadis lainnya dalam *al-kutub al-tis'ah* menegaskan tentang eksistensi dan kedudukan wali dalam pernikahan, bahwa suatu pernikahan belumlah sempurna dan sah tanpa peran dan kehadiran wali di dalamnya.

3. Ijtihad Ulama

Menurut pendapat imam al-Syafi'i, rukun nikah terdiri atas lima hal, yaitu: 1) calon suami; 2) calon istri; 3) wali nikah; 4) dua orang saksi; dan 5) ijab dan qabul. Dalil yang dijadikan pijakan oleh imam Syafi'i adalah QS. Al-Baqarah/2: 234. Ia dan pengikutnya berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada para wali. Sebagaimana yang diinginkan oleh kalimat “فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ” yang merupakan seruan yang ditujukan kepada para wali. Pendapat ini didukung oleh Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal.²¹

Sebaliknya, Imam Abu Hanifah, Zufar, al-Sya'biy dan al-Zuhriy berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan aqad nikah tanpa wali sedang calon suaminya *sekufu'*, maka pernikahannya sah. Dalilnya juga didasarkan pada ayat 234 surah al-Baqarah di atas. Menurut mereka kalimat *فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ*²² justeru merupakan informasi atau dalil mengenai bolehnya wanita bertindak untuk menikahkan dirinya sendiri.²²

²⁰ Abu Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'ats al-Sijistāniy, *Sunan Abi Dāwūd*, Juz. 2 (Beirūt: al-Maktabah al-'Ashriyyah, t.th), h. 229. (Hadis No. 2085, “Bāb fī al-Waliyy”)

²¹ Abd al-Rahmān al-Jazīriy, *al-Fiqh 'Alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, Juz. IV, h. 47-48.

²² Abd al-Rahmān al-Jazīriy, *al-Fiqh 'Alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, h. 47-48.

Sementara Abu Daud merinci persoalan tersebut dengan memisahkan status wanita tersebut, apakah gadis atau janda. Apabila wanita itu masih gadis maka disyaratkan adanya wali, tetapi kalau sudah berstatus janda, maka dibolehkan menikah tanpa wali. Sementara pendapat yang mengatakan bahwa wali bukanlah syarat sahnya pernikahan, juga didasarkan pada ayat yang sama.²³

4. Perundang-Undangan

Salah satu keistimewaan dari persoalan wali adalah telah dimasukkannya aturan tentang wali tersebut ke dalam materi hukum positif yang diberlakukan di Negara kita. Pencantuman pasal-pasalinya meliputi Eksistensi, wewenang, klasifikasi, dan syarat-syarat wali dalam pernikahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wali adalah:

a. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Penegasan tentang wali tercantum dalam Bab II mengenai syarat-syarat perkawinan, Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi:

“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”²⁴

Kemudian pada Pasal (2) dikatakan:

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”²⁵

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di atas, pencantuman dan pembahasan tentang wali belumlah dijelaskan secara detail mengenai kriteria, wewenang, dan fungsinya. Hal ini dapat dimaklumi sebab memang Undang-undang ini adalah masih aturan awal yang hadir mengenai pernikahan di Indonesia, sehingga sifatnya masih sangat sederhana dan masih perlu direvisi dan ditopang oleh aturan lain. Jadi secara implisit bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian,

²³ Abd al-Rahmān al-Jazīriy, *al-Fiqh ‘alā al-Madzāhib al-Arba’ah*, h. 47-48.

²⁴ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Surabaya: Arkola, t.th), h. 13.

²⁵ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, h. 7.

apabila ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami isteri, maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur.²⁶

b. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991)

Aturan perundang-undangan kedua yang juga mengatur tentang wali dalam pernikahan adalah Instruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, biasa disebut KHI. Setidaknya ada 6 pasal yang membicarakan tentang aturan wali dalam pernikahan, yaitu:

1. Pasal 1; “Yang dimaksud dengan:(b). Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”
2. Pasal 14:
“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:
 - a. Calon Suami
 - b. Calon Isteri
 - c. Wali Nikah
 - d. Dua Orang Saksi, dan
 - e. Ijab dan Kabul
3. Pasal 19:
“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”²⁷
4. Pasal 20 ayat (1)
“Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh”²⁸
ayat (2)
“Wali nikah terdiri dari: a. Wali Nasab b. Wali Hakim”
5. Pasal 21 ayat (1)
“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Cet. 4; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 85.

²⁷ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Instruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama R.I., 1999), h. 20.

²⁸ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Instruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 20.

kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita”

ayat (2)

“Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita”

Ayat (3)

“Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah”

Ayat (4)

“Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali”

6. Pasal 22:

“Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”

7. Pasal 23 ayat (1):

“Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan”

Ayat (2):

“Dalam hal wali ‘*adhal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”²⁹

²⁹ Pasal-pasal tersebut selain tercantum dalam buku Kompilasi Hukum Islam juga dikutip dalam beberapa literatur, baik sebagai kutipan dalam isi buku maupun sebagai lampiran. Lihat, Amiur Nuruddin dan Azhari Ahmad Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2004), h. 72-73. Lihat pula, Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 147-148.

Deskripsi Hadis Wali Nikah Dalam Kitab Kumpulan Hadis

Setelah dilakukan penelusuran pada sembilan kitab kumpulan hadis (*kutub al-tis'ah*), diperoleh gambaran bahwa terdapat 35 hadis yang berbicara tentang wali nikah, setelah dikeluarkan hadis yang sifatnya hanya atsar Sahabat. Jika diklasifikasi, semua hadis-hadis tersebut dapat dibagi menjadi empat pembicaraan pokok tentang wali nikah, yaitu:

1. Eksistensi Wali Dalam Pernikahan

a. Dalam Kitab Sunan Ibnu Majah

1. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَكَاحُ إِلَّا بِوَالِيٍّ»³⁰
2. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَكَاحُ إِلَّا بِوَالِيٍّ»³¹

b. Dalam Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal

1. حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَغْنِي الرَّقِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَكَاحُ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ»³²
2. حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَكَاحُ إِلَّا بِوَالِيٍّ»³³
3. حَدَّثَنَا أُسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَبُرَيْدُ بْنُ هَازِرُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَكَاحُ إِلَّا بِوَالِيٍّ»³⁴
4. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَكَاحُ إِلَّا بِوَالِيٍّ»³⁵

Lihat juga, Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000, h. 13, 18, 20-22.

³⁰ Abu Abdullāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwīniy, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz. 1 (Kairo: Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th), h. 605. (Hadis No. 1880 “Bāb Lā Nikāha Illā biwāliyy”)

³¹ Abu Abdullāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwīniy, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz. 1, h. 605. (Hadis No. 1881 “Bāb Lā Nikāha Illā biwāliyy”)

³² Abu Abdullāh Ahmad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibāniy, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz. 4 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 121. (Hadis No. 2260. “Bab Musnad Abdullāh bin al-Abbās bin Abdul Mutthalib”.)

³³ Abu Abdullāh Ahmad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibāniy, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, h. 280. (Hadis No. 19518. Bab Hadīs Abī Mūsā al-Asy'ariy”).

³⁴ Abu Abdullāh Ahmad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibāniy, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, h. 482. (Hadis No. 19710. “Bāb Hadīs Abī Mūsā al-Asy'ariy”).

5. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ أَبُو خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانَ وَوَلِيٍّ لَهُ»³⁶

c. Dalam Kitab Sunan al-Darimiy

1. أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»³⁷

2. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَنبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»³⁸

d. Dalam Kitab Sunan Abi Daud

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَغْرِينَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ، وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»³⁹

e. Dalam Kitab Muwattha' Malik

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ السُّلْطَانَ»⁴⁰

f. Dalam Kitab Sunan al-Tirmidzy

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.⁴¹

2. Hadis Tentang Fungsi Wali

a. Dalam Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal

³⁵ Abu Abdullāh Ahmad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibāniy, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, h. 523. (Hadis No. 19746. “Bāb Hadīs Abī Mūsā al-Asy’ary”).

³⁶ Abu Abdullāh Ahmad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibāniy, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, h. 287. (Hadis No. 26235. “Bāb Musnad al-Shiddīqah Aisyah binti al-Shiddīq”).

³⁷ Muhammad bin Abdurrahmān bin al-Fadhil bin Bahram bin Abdusshamad al-Dārimiy, *Musnad al-Dārimiy*, (Dār al-Fikr: Kairo: 1978), Juz 2, h. 137. (Hadis No. 2228 “Bāb al-Nahyu an al-Nikāh Bigairi Waliyy”).

³⁸ Muhammad bin Abdurrahmān bin al-Fadhil bin Bahram bin Abdusshamad al-Dārimiy, *Musnad al-Dārimiy*, h. 138. (Hadis No. 2229)

³⁹ Abu Dāwūd Sulaimān bin al-Asy’ats al-Sijistāniy, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 2, h. 229. (Hadis No. 2085, “Bāb fi al-Waliyy”).

⁴⁰ Mālik bin Anas bin Mālik al-Ashbahiy al-Madaniy, *Muwattha’*, Juz 2, (Beirūt: Dār Ihyā’ al-Turāts al-Arabiyy, 1985), h. 525. (Hadis No. 5 “Bāb Isti’dzān al-Bikr wa al-Tsayyib fi Anfusihimā”).

⁴¹ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Mūsā al-Tirmidziy, *al-Jāmi’ al-Kabīr Sunan al-Tirmidziy*, Juz 2 (Beirūt: Dār al-Garb al-Islāmiyy, 1998), h. 409. (Hadis No. 1101 “Bāb Mā Jā’a fi al-Waliyyayn”).

1. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَكَكَ فِيهِ فِي كِتَابِ الْبَيْهَقِيِّ، فَقَالَ عَنْ عُثْمَةَ أَوْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانٍ، فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا"⁴²
2. حَدَّثَنَا رُوَيْحٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، وَحَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانٍ، فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا"⁴³

b. Dalam Kitab Sunan al-Darimy

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَازُونَ، أَنبَأَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَةَ بِنِ عَامِرٍ، أَوْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانٍ لَهَا، فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا»⁴⁴

c. Dalam Kitab Sunan Abi Daud

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ الْمَعْنَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانٍ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا»⁴⁵

d. Dalam Kitab Sunan al-Tirmidziy

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانٍ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا.⁴⁶

e. Dalam Kitab Sunan al-Nasa'iy

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانٍ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا»⁴⁷

3. Hadis Tentang Batalnya Pernikahan Tanpa Wali

⁴² Abu Abdullāh Ahmad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibāniy, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz. 33, h. 276. (Hadis No. 20085. Bāb Min Hadīṣ Samurah bin Jundub).

⁴³ Abu Abdullāh Ahmad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibāniy, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz. 33, h. 367. (Hadis No. 20208. Bāb Min Hadīṣ Samurah bin Jundub).

⁴⁴ Abu Muhammad Abdullāh bin Abdu al-Shamad al-Dārimiy, *Sunan al-Dārimiy*, Juz. 3 (Cet. I; Saudi Arabia: Dār al-Mugniy li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2000), h. 1401. Hadis No. 2239 Bāb al-Mar'ah Yuzawwjuhā Waliyyān.

⁴⁵ Abu Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'ats al-Sijistāniy, *Sunan Abī Dāwūd*, h. 230. (Hadis No. 2088, "Bāb Idzā Ankaha al-Waliyyān").

⁴⁶ Muhammad bin Isā bin Saurah bin Mūsā al-Tirmidziy, *al-Jāmi' al-Kabīr Sunan al-Tirmidziy*, Juz. 2, h. 409. (Hadis No. 1110 "Bāb Mā Jā'a fi al-Waliyyayn")

⁴⁷ Abu Abdurrahmān bin Ali al-Khurasāniy al-Nasā'iy, *Sunan al-Nasā'iy*, Juz. 7 (Cet. II; Halab: Maktab al-Mathbū'at al-Islāmiyyah, 1986), h. 314. (Hadis No. 4682 "Bāb Arrajulu Yabī'u al-Sil'ah Fayastahiqquhā")

a. Dalam Kitab Musnad Ahmad

1. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ بَعِيرًا أَمْرٌ مَوْلَاهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَا وَوَيْ لَهُ ⁴⁸،
2. حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْبَعَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بَعِيرٍ إِذْ نِوَيْتَهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجْرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَا وَوَيْ لَهُ» ⁴⁹
3. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بَعِيرٍ إِذْ نِوَيْتَهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلَاثًا - وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا، فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَوَيْ مِنْ لَا وَوَيْ لَهُ ⁵⁰»

b. Dalam Kitab Sunan al-Tirmidziy

- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بَعِيرٍ إِذْ نِوَيْتَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَا وَوَيْ لَهُ ⁵¹.

c. Dalam Kitab Sunan Abi Daud

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بَعِيرٍ إِذْ نِوَيْتَهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَا وَوَيْ لَهُ» ⁵².

d. Dalam Kitab Sunan Ibnu Majah

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا الْوَلِيُّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،

⁴⁸ Abu Abdullāh Ahmad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibāniy, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz. 40, h. 243. (Hadis No. 24205, "Bāb Musnad al-Shiddīqah 'Aisyah binti al-Shiddīq").

⁴⁹ Abu Abdullāh Ahmad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibāniy, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz. 40, h. 435. (Hadis No. 24372, "Bāb Musnad al-Shiddīqah 'Aisyah binti al-Shiddīq").

⁵⁰ Abu Abdullāh Ahmad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibāniy, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz. 42, h.200. (Hadis No. 25326, "Bāb Musnad al-Shiddīqah 'Aisyah binti al-Shiddīq").

⁵¹ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Mūsā al-Tirmidziy, *al-Jāmi' al-Kabīr Sunan al-Tirmidziy*, Juz. 2, h. 398. (Hadis No. 1102 "Bāb Mā Jā'a Lā Nikāha Illā Biwaliyy")

⁵² Abu Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'ats al-Sijistāniy, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz. 2, h. 229. (Hadis No. 2083, "Bāb fi al-Waliyy").

فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالْأَسْلُطَانُ وَكِ مِنْ لَا وَكِ
 لَهُ»⁵³

e. Dalam Kitab Sunan al-Darimy

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ
 اشْتَجَرُوا فَالْأَسْلُطَانُ، وَكِ مِنْ لَا وَكِ لَهُ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا"⁵⁴

4. Hadis tentang Batas Kewenangan Wali dalam Pernikahan

a. Dalam Kitab Shahih Muslim

1. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُخْبِرُ
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الَّتَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا
 سُكُوتُهَا»⁵⁵
2. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ:
 قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا»؟ قَالَ: نَعَمْ.⁵⁶
3. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «الَّتَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا
 أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا»⁵⁷

b. Dalam Kitab Sunan al-Tirmizy

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ ابْنِ
 عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا
 صَمَاتُهَا»⁵⁸

c. Dalam Kitab Musnad al-Darimy

⁵³ Abu Abdullāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwīniy, *Sunan Ibnu Mājah*, h. 605. (Hadis No. 1879 “Bāb Lā Nikāha Illā Biwaliyy”)

⁵⁴ Abu Muhammad Abdullāh bin Abdusshamad al-Dārimiy, *Sunan al-Dārimiy*, Juz. 3, h. 137. (Hadis No. 2230 “Bāb al-Nahyu ‘an al-Nikāh bi Gairi Waliyy”)

⁵⁵ Muslim bin al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisābūriy, *Shahīh Muslim*, Juz. 2 (Beirūt: Dār Ihyā’ al-Turāts al-‘Araby, t.th.), h. 1037. (Hadis No. 1421-67 “Bāb Isti’dzān al-Tsayyib fi al-Nikāh”.)

⁵⁶ Muslim bin al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisābūriy, *Shahīh Muslim*, Juz. 2, h. 1036. (Hadis No. 1421-66).

⁵⁷ Muslim bin al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisābūriy, *Shahīh Muslim*, Juz. 2, h. 1038. (Hadis No. 1421-68)

⁵⁸ Muhammad bin Isā bin Saurah bin Mūsā al-Tirmidziy, *al-Jāmi’ al-Kabīr Sunan al-Tirmidziy*, Juz. 2, h. 398. (Hadis No. 1108 “Bāb Mā Jā’ a Lā Nikāha Illā Biwaliyy”)

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صَمَائِبُهَا»⁵⁹

d. Dalam Kitab Sunan al-Nasa'iy

1. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صَمَائِبُهَا»⁶⁰

2. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِ نَافِعِ بْنِ سَتَةَ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ حَلَقَةٌ -، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبَيْتِيَّةُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا صَمَائِبُهَا»⁶¹

e. Dalam Kitab Muwattha' Malik

حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَائِبُهَا»⁶²

f. Dalam Kitab Sunan Abi Daud

1. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ: «النَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يُسْتَأْمَرُ بِهَا أَبُوهَا»⁶³
2. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صَمَائِبُهَا»⁶⁴.

Layaknya sebagai suatu hasil periyawatan/penerimaan informasi dari masa klasik, tentu dibutuhkan langkah penelusuran mengenai asal usul dan kualitas para perawinya supaya dapat terjamin kualitas dan sisi validitasnya untuk dapat diterima sebagai petunjuk hukum. Upaya yang bisa dilakukan salah satunya adalah melakukan studi kritik hadis, baik dari segi sanad maupun matannya.

⁵⁹ Abu Muhammad Abdullāh bin Abdu al-Shamad al-Dārimiy, *Sunan al-Dārimiy*, Juz. 3, h. 138. (Hadis No. 2234 “Bāb Isti’ mār al-Bikr wa al-Tsayyib”).

⁶⁰ Abu Abdurrahmān bin Ali al-Khurasāniy al-Nasā’iy, *Sunan al-Nasā’iy*, Juz. 6, h. 84. (Hadis No. 3260 “Bāb Isti’ dzān al-Bikr fi Nafsihā”).

⁶¹ Abu Abdurrahmān bin Ali al-Khurasāniy al-Nasā’iy, *Sunan al-Nasā’iy*, Juz. 6, h. 84. (Hadis No. 3261 “Bāb Isti’ dzān al-Bikr fi Nafsihā”).

⁶² Mālik bin Anas bin Mālik al-Ashbahiy al-Madaniy, *Muwattha’*, h. 524. (Hadis No. 4 “Bāb Isti’ dzān al-Bikr wa al-Tsayyib fi Anfusihimā”).

⁶³ Abu Dāwūd Sulaimān bin al-Asy’ats al-Sijistāniy, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz. 2, h. 229. (Hadis No. 2099, “Bāb fi al-Waliyy”).

⁶⁴ Abu Dāwūd Sulaimān bin al-Asy’ats al-Sijistāniy, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz. 2, h. 232. (Hadis No. 2098, “Bāb fi al-Tsayyib”).

Sebagai sampel, akan ditelusuri riwayat hadis yang diperoleh dari Ibnu Majah sebagaimana yang terdapat dalam kitab Sunan-nya. Matan hadis tersebut adalah:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا الْوَلِيُّ، فَكَأَمَّا بَاطِلٌ، فَكَأَمَّا بَاطِلٌ، فَكَأَمَّا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا، قَالِ السُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ»

Sedangkan rangkaian sanadnya terdiri atas: Abu Bakar bin Abi Syaibah, Mu'adz, Ibnu Juraij, Sulaiman bin Musa, al-Zuhriy, Urwah, dan 'Aisyah.

1. Kritik Hadis Dari Sisi Sanad

Berikut penelusuran rijal/rawi yang menjadi sanad hadis di atas disertai komentar para ulama hadis terkait kredibilitas dan kualitas mereka dalam meriwayatkan suatu hadis.

a. Abu Bakar bin Abi Syaibah:

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Utsman al-Absy al-Kufy al-Hafidzh Abu Bakar bin Abi Syaibah. Wafat tahun 235 H. di Kufah. Menurut al-'Ujaily, Abu Hatim, dan Ibnu Kharrasy dia orang yang *tsiqah* (terpercaya). Sementara Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dia adalah *Shaduq* (Jujur).⁶⁵

b. Mu'adz

Nama lengkapnya adalah Mu'adz bin Mu'ad bin Nashr al-Timy al-Anbary Abu al-Mutsanna al-Bashry. Beliau pernah menjabat sebagai Qadhi/Hakim di Basrah. Mengenai kualitas periwayatannya, Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya, Abu Hatim, dan selainnya menyatakan bahwa ia *tsiqah*. Wafat pada tahun 196 H. di Basrah.⁶⁶

c. Ibnu Juraij

Namanya adalah 'Abdul Malik bin 'Abdul 'Aziiz bin Juraij, Abu Khaalid atau Abul Waliid Al-Qurasyiy Al-Makkiy Al-Umawiy, Al-Imaam Ats-Tsiqah Al-'Allaamah Al-Haafizh. Faqih negeri Hijaaz. Berasal dari negeri Ruum (Romawi). 'Athaa' bin Abi Rabah berkata "Pemuka para pemuda ahlul Hijaaz adalah Ibnu Juraij". Sedangkan 'Aliy bin Al-Madiiniy berkata, aku bertanya kepada Yahya bin Sa'id, siapakah yang paling tsabat dari teman-teman Nafi'? Ia menjawab,

⁶⁵Abi al-Mahāsin Muhammad bin Ali al-'Alawiy al-Hāsyimiy, *Kitāb al-Tadzkirah bi Ma'rifati Rijāl al-Kutub al-Tis'ah*, Juz. 3 (Cairo: Maktabah al-Khanjiy, t.th), h. 919.

⁶⁶Abi al-Mahāsin Muhammad bin Ali al-'Alawiy al-Hāsyimiy, *Kitāb al-Tadzkirah bi Ma'rifati Rijāl al-Kutub al-Tis'ah*, h. 1678.

“Ayyub, ‘Ubaidillah dan Malik bin Anas. Sementara Ibnu Juraij paling tsabat dari pada Malik pada periwayatan Nafi’. Shalih bin Ahmad bin Hanbal berkata, dari ayahnya, ‘Amr bin Dinar dan Ibnu Juraij keduanya paling tsabat pada periwayatan ‘Atha’. Ahmad bin Sa’d bin Abi Maryam berkata, dari Yahya bin Ma’in, “Tsiqah pada semua yang diriwayatkan darinya dari kitab. Ja’far bin ‘Abdul Wahid berkata: dari Yahya bin Sa’id bahwa Ibnu Juraij orang yang jujur. Jika ia mengatakan “telah menceritakan kepadaku” maka ia mendengarnya. Beliau wafat pada tahun 150 H pada usia 76 tahun. Ibnu Juraij dimasukkan pada thabaqah ketiga dalam periwayatan hadis.⁶⁷

d. Sulaiman bin Musa

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Musa al-Umayy al-Dimasyqiyy al-Asydaq al-Asadiy. Ia biasa dipanggil dengan Abu Ayyub atau Abu al-Rabi’ atau Abu Hisyam. Ia berada pada tingkatan kelima dari perawi hadis. Dari segi kualitas periwayatan, Abdul Gaffar Sulaiman al-Bandary dan Sayyid Kisrawy Hasan mengatakan Shaduq, Faqih, Fi Haditsihi Ba’dha Layyin wa Khalatha Qabla Mautihi Biqalil. Artinya ia orang jujur, faham agama (ahli fikih), dalam beberapa kasus periwayatannya dijumpai hal-hal yang kesalahan kecil, namun hal itu kembali bisa dipadukan sesaat sebelum ia meninggal dunia. Dan menurut Abul Hasan Nuruddin al-Sanady “وهو ثقة” artinya orangnya terpercaya.⁶⁸

e. al-Zuhry

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muslim bin ‘Ubaidillah bin ‘Abdullah bin Syihab bin ‘Abdullah bin al-Haris bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Galib al-Quraisiy al-Zuhriy Abu Bakr al-Madaniy (50-124 H.). Ia lebih populer dengan nama Ibn Syihab atau al-Zuhriy. Ia menerima hadis dari Urwah (seorang tabi’in besar) dengan lambang periwayatan (*sigat al-Tahammul*) ’an sedangkan muridnya yang meriwayatkan hadisnya adalah Syu’aib dengan ’an pula.

⁶⁷ Lihat <https://muhandisun.wordpress.com/2013/04/28/ibnu-juraij-rahimahullah/>, (diakses 16 Oktober 2015). Lahaji, L., & Sulaiman Ibrahim. Fiqh Perempuan Keindonesiaan. *Al-Bayyinah*, 3 (1) 2019, 1-14.

⁶⁸ Abdul Gaffar Sulaiman al-Bandariy dan Sayyid Kisrawy Hasan, *Mausū’ah Rijāl Kutubu al-Tis’ah*, Juz. 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h. 105.

Al-Zuhriy adalah periwayat hadis yang memiliki sifat kejujuran dan kedabitan. Hal itu diakui oleh para ahli hadis seperti: Ibn Sa'ad, yang mengatakan bahwa al-Zuhriy adalah seorang *tsiqah*, *'alim* (ilmuan), periwayat yang *faqih* dan *jami'*; Abu al-Zinad mengatakan bahwa ia adalah *'alim* di masanya, ia dapat menulis apa yang pernah didengarnya dan menjadi *hujjah*; al-Lays mengatakan bahwa saya tidak pernah melihat orang yang pintar melebihi al-Syihab⁶⁹; Ibn Manjuwiyah juga mengatakan bahwa al-Zuhriy adalah orang yang pernah bertemu dengan sepuluh sahabat Nabi, dan dia adalah paling *hafiz* pada masanya.⁷⁰

f. Urwah

Nama lengkapnya adalah 'Urwah bin al-Zubayr bin al-Awwam bin Khuwaylid bin Asad bin 'Abd al-'Uzza al-Qurasyiy al-Asadiy, Abu 'Abd Allah al-Madaniy (22-93 H.). Sebagai seorang tabi'in besar yang teruji kualitasnya, 'Urwah termasuk periwayat hadis yang banyak menerima hadis dari 'Aisyah (bibinya), di samping berguru kepada Asma bint Abi Bakr (ibunya) sendiri, juga kepada Abu Humaid al-Saidiy. Sedangkan muridnya antara lain adalah al-Zuhriy dan Hisyam (putranya) dan lain-lain.

Menurut penilaian para ahli hadis, 'Urwah termasuk orang yang terpuji. Ibn Saad, menempatkannya pada periwayat tingkat kedua (*al-tabaqat al-saniyah*) dari penduduk Madinah dengan sifat-sifat *siqah*, *faqih*, *ma'mun*, *'alim*, *hafdz* dan *tsabat*;⁷¹ Al-Ujaily mengatakan, bahwa 'Urwah adalah tabi'in yang *siqah*, *saleh* dan tidak pernah terkena fitnah; Sufyan bin Uyainah (w. 198 H.) mengatakan, bahwa hanya ada tiga orang yang paling mengetahui hadis 'Aisyah, yaitu al-Qasim bin Buhammad, 'Urwah bin al-Zubair, dan 'Amrah bint 'Abd al-Rahman; dan Ibn Hibban memasukkan 'Urwah

⁶⁹ Syihābuddīn Ahmad bin 'Ali Ibn Hajar al-Asqalāniy, *Tahdzīb al-Tahdzīb*, Jilid. V (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr li al-Thibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1984), h. 397-398.

⁷⁰ Jalāluddīn 'Abdurrahmān bin Abi Bakr al-Suyūthiy, *Tabaqāt al-Huffādzh* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), h. 49-50.

⁷¹ Lihat, Muhammad Mushthafa al-A'dzimiy, *Dirāsāt fī al-Ahādīts al-Nabawiy wa Tārīkh Tadwīnih*, Juz. I (Makkah: al-Maktabat al-Islāmiy, 1992), h. 157.

ke dalam kelompok orang yang *tsiqah*. Dia adalah penduduk Madinah yang sangat utama dan seorang cendekiawan.⁷²

g. Aisyah

Nama lengkapnya adalah ‘Aisyah binti Abi Bakr al-Siddiq. Ia lahir dan wafat di Madinah pada tahun 58 H. Ia termasuk salah seorang dari isteri Nabi yang dinikahinya dalam keadaan *bikr* (perawan), sehingga bapaknya mendapat gelar Abu Bakar (bapak perawan). Dalam Ilmu hadis, ‘Aisyah r.a. termasuk dalam golongan sahabat, karena bukan saaja pernah melihat dan sezaman dengan Rasulullah, tetapi lebih daripada itu, dia bergaul, makan dan tidur bersama Rasulullah, sehingga semua hadis yang diriwayatkannya, tidak perlu lagi diragukan kebenarannya.

2. Kritik dari Sisi Matan

Secara metodologis, kritik atau penelitian kualitas matan suatu hadis dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu dengan melihat kualitas sanadnya, kemudian penelitian mengenai susunan lafal matannya dari berbagai versi yang semakna, serta penelitian isi kandungan matan yang biasa disebut dengan *fiqhul hadis* atau *syarah hadis*.

Berdasarkan jalur sanad hadis yang dijadikan sampel penelitian serta mengacu pada komentar para ulama hadis sebagaimana tertuang dalam bagian kritik sanad di atas menunjukkan bahwa sanad hadis yang diteliti ini dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan kredibilitasnya. Sebab semua perawinya memiliki sifat *al-siqah, faqih, al-sauduq, ‘alim, sabat*. Dan sesuai dengan hasil *i’tibar* di atas, hadis tentang wali nikah yang menjadi obyek penelitian ini dari segi sanad secara teoritis memenuhi kriteria sebagai hadis shahih, karena:

- a) Diriwayatkan secara makna dengan melalui satu jalur yaitu Aisyah. Semua sanad hadis sampai kepada rawinya secara berturut dan berantai adalah *muttashil* dan tidak ada rawi yang tercela.
- b) Pada hadis tersebut terdapat *mutabi’*.

Selanjutnya untuk mengetahui kualitas matannya perlu dilakukan *uqaranah* atau perbandingan antara redaksi matan yang satu dengan yang lainnya guna mengetahui apakah hadis ini diriwayatkan secara lafad atau secara makna.

⁷²Abu ‘Abdullāh Muhammad bin Ahmad bin ‘Utsmān al-Dzahabiy, *Siyar A’lām al-Nubalā’* (Cet. VII; Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1990), h. 320-324.

Berdasarkan redaksi, sampel hadis yang dikaji memiliki beberapa redaksi:

(1) Musnad Ahmad

(Riwayat Pertama)

إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ بَعِيرَ أَمْرِ مَوْلَاهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ.

(Riwayat Kedua)

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بَعِيرَ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرَجِهَا، وَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ»

(Riwayat Ketiga)

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بَعِيرَ إِذْنِ مَوْلَاهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلَاثًا - وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَوَلِيَّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ

(2) Sunan al-Tirmidzy

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بَعِيرَ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرَجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ

(3) Sunan Abi Daud

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بَعِيرَ إِذْنِ مَوْلَاهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ

(4) Sunan Ibnu Majah

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ

(5) Sunan al-Darimy

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بَعِيرَ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ، وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرَجِهَا.

Setelah membandingkan redaksi-redaksi matan di atas, tidak tampak perbedaan yang berarti dari lafal atau kalimat yang digunakan oleh para perawi. Walaupun tentunya dijumpai perbedaan penggunaan sigat lafad atau bentuk kalimat, atau adanya penambahan dan pengurangan kata tertentu dalam redaksi matan di sana sini, namun secara substansi hal tersebut tidak memalingkan tiga maksud dan hukum pokok yang terkandung dan dibawa oleh masing-masing matan sehingga tidak terjadi *ta'arudh al-adillah* atau kontradiksi petunjuk hukum dari dalil sebagaimana yang dikhawatirkan dalam metode peristimbatan hukum dalam fikih. Adapun ketiga hukum pokok yang tetap terkandung dalam masing-masing matan hadis tersebut adalah:

- a) Wanita manapun yang dinikahkan tanpa wali maka pernikahannya dianggap batal.
- b) Jika sudah terlanjur menikah dan terjadi dukhul (hubungan badan) maka si wanit berhak mendapat mahar mitsil.

- c) Jika para wali nasab berselisih tentang siapa yang lebih berhak menikahkan anak walinya sehingga menyebabkan terjadinya mudharat bagi si wanita, maka hak perwalian diserahkan kepada *sulthan*.

Dengan demikian, secara redaksional matan hadis-hadis tersebut tidak bermasalah. Apalagi tidak ditemukan adanya dalil *naqli* dan *aqli* yang menolak tiga ketentuan yang terkandung dalam matan hadis tersebut. Maka dapat diyakini bahwa matan hadis tersebut adalah *shahih*.

Analisis Isi Kandungan Hadis

Kritik sanad dan matan hadis di atas akan lebih kuat bila dilakukan penelusuran isi kandungan hadis tersebut berdasar kitab syarah hadis agar dapat lahir pemahaman komprehensif tentang hadis wali di atas. Salah satu kitab yang memberi penjelasan atas kandungan hadis wali ditemukan dalam kitab *Aunu al-Ma'būd Syarah Sunan Abi Dāūd*. Adapun teks hadis yang akan disyarah adalah:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَليَ لَهُ

Teks syarah dari hadis tersebut sebagai berikut:

المُرَادُ بِالْوَلِيِّ هُوَ الْأَقْرَبُ مِنَ الْعَصْبَةِ مِنَ النَّسَبِ ثُمَّ مِنَ السَّبَبِ ثُمَّ مِنَ عَصْبَتِهِ وَلَيْسَ لِذَوِي السَّهَامِ وَلَا لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَلَايَةٌ وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ثُمَّ وَليٌّ أَوْ كَانَ مُوجُودًا وَعَضَلَ انْتَقَلَ الْأَمْرُ إِلَى السُّلْطَانِ قَالَهُ فِي التَّيْلِ. وَقَالَ عَلِيُّ الْقَارِيءُ الْحَنْفِيُّ الْوَلِيُّ هُوَ الْعَصْبَةُ عَلَى تَرْتِيبِهِمْ بِشَرْطِ حُرِّيَّةٍ وَتَكْلِيفٍ ثُمَّ الْأُمُّ ثُمَّ ذُو الرَّجْمِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ثُمَّ مَوْلَى الْمَوَالَتِ ثُمَّ الْقَاضِي (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ) أَيُّ نَفْسَهَا وَأَيُّمَا مِنَ الْفَاطِطِ الْعُمُومِ فِي سَلْبِ الْوَلَايَةِ عَنْهُنَّ مِنْ غَيْرِ تَخْصِصٍ يَبْغِضُ ذُوْنَ بَعْضٍ (بِعَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا) أَيُّ أَوْلِيَائِهَا (فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) أَيُّ قَالَ كَلِمَةً فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (فَإِنْ دَخَلَ) أَيُّ الَّذِي نَكَحَتْهُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا (فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا) وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ قَالَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا (فَإِنْ تَشَاجَرُوا) أَيُّ تَنَازَعِ الْأَوْلِيَاءِ وَاخْتَلَفُوا بَيْنَهُمْ وَالتَّشَاجُرُ الْخُصُومَةُ وَالْمُرَادُ الْمَنْعُ مِنَ الْعَقْدِ دُونَ الْمَشَاحَةِ فِي السَّبْقِ إِلَيْهِ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ نَظَرًا مِنْهُ فِي مَضْلَحَتِهَا قَالَهُ فِي الْمَجْمَعِ (فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَليَ لَهُ) لِأَنَّ الْوَلِيَّ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ التَّرْوِيجِ فَكَانَتْ لَا وَليَ لَهَا فَيَكُونُ السُّلْطَانُ وَوَلِيَّهَا وَالْأَقْرَبُ وَلَايَةٌ لِلْسُّلْطَانِ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيِّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَبَنَ مَاجَهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالْحَدِيثُ يُدَلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ إِلَّا بِوَلِيٍّ. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى اشْتِرَاطِهِ وَحَكِي عَنْ بَنِ الْمُنْذِرِ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافَ ذَلِكَ وَذَهَبَتْ الْحَنْفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَشْتَرُطُ مَطْلَقًا وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ بَنِ عَبَّاسٍ الْأَيْمِّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا الْحَدِيثُ وَفِي لَفْظِ لِمُسْلِمٍ الْبَيْتُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

وَالْجَوَابُ مَا قَالَ بِنِ الْجَوْرِيِّ فِي التَّحْقِيقِ أَنَّهُ أَثْبَتَ لَهَا حَقًّا وَجَعَلَهَا أَحَقَّ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَالِي إِلَّا مُبَاشَرَةٌ وَلَا يُجُوزُ لَهُ أَنْ يَزَوِّجَهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا كَذَا فِي تَخْرِيجِ الْهَدَايَةِ لِلزَّيْلَعِيِّ. وَالْحَقُّ أَنَّ التَّكَاحَ بِغَيْرِ الْوَالِي بَاطِلٌ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ الْبَابِ.⁷³

Intisari kandungan dari redaksi syarah hadis di atas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Menurut Jumhur Ulama, yang dimaksud dengan wali nikah adalah orang yang paling dekat hubungan kekerabatannya secara nasab, kemudian paling akrab dari segi sebab kekerabatan, kemudian keluarga dari jalur ashabah. Adapun keluarga yang termasuk kelompok *dzawil arham* (kelompok keluarga yang terhalang mendapat warisan/keluarga jauh) maka tidak memiliki hak menjadi wali. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dzawil arham termasuk kelompok yang berhak menjadi wali. Ali al-Qari' al-Hanafy berkata wali itu adalah kerabat ashabah secara berurut dengan syarat ia independen dan mukallaf, kemudian ibu lalu dzawil arham kemudian maula kemudian qadhi. Makanya, tatakala kerabat dekat tidak ada merekalah yang berhak menjadi wali, atau ada namun enggan maka beralihlah hak perwalian kepada sulthan.
2. Kalimat “أَيُّمَا امْرَأَةً نَكَحْتَ” maksudnya mengawinkan dirinya sendiri. Dengan adanya lafad *ayyuma* menjadikan redaksi hadis ini berkonotasi umum dalam hal dilekatkannya perwalian bagi mereka tanpa ada deskriminasi. Adapun maksud dari “بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا” adalah tanpa izin dari para walinya. Sementara kata “فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ” maksudnya Nabi mengatakan “nikahnya batal” sebanyak tiga kali berturut-turut. Maksud dari “فَإِنْ دَخَلَ” artinya jika terlanjur sudah menggauli wanita yang dinikahnya tanpa izin wali tersebut, maka “فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا” dalam riwayat al-Tirmidzy بِمَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا فَتَرَجَهَا artinya maka wanita tersebut berhak atas mahar yang sudah diberikan, dan kalau belum diberikan maka ia berhak atas *mahar mitsil* sebagai kompensasi atas apa yang telah direnggut dari dirinya (menghalalkan faraj). Kemudian “فَإِنْ تَشَاجَرُوا” artinya jika semua wali dari si wanita berselisih atau terjadi konflik dan perbedaan pendapat yang tajam yang mengakibatkan masing-masing enggan dan ngotot atas hak

⁷³Muhammad Asyraf bin ‘Āmir bin Ali bin Haidar Abu Abdurrahmān Abbādiy, ‘*Aunu al-Ma’būd Syarah Sunan Abī Dāwūd*, Juz. 6 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H.), h. 69-72.

perwaliannya, bukan saling berlomba untuk menikahkannya karena menganggap ialah yang lebih berhak, maka “فَالسُّطَّانُ وَيُؤْتِي”
”من لا ولي له” artinya hak perwalian berpindah ke tangan sulthan/penguasa. Sebab dengan keengganan atau ketidaksediaan wali menikahkan maka hal itu sama artinya seakan-akan wanita tersebut tidak memiliki wali. Namun jika walinya ada dan mau menikahkan maka tidak ada hak atas penguasa untuk menikahkannya.

3. Imam al-Tirmidzy menilai hadis ini sebagai hadis hasan.
4. Hadis ini menjadi dalil akan tidak sahnya suatu pernikahan tanpa izin atau kehadiran wali. Meski demikian dalam persoalan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Jumah Ulama wali menjadi syarat sahnya suatu pernikahan, bahkan Ibnu Mundzir mengutip bahwa tidak ada satupun sahabat Nabi yang menyalahinya. Tapi madhab Hanafiyah sama sekali tidak mensyaratkan wali dalam suatu pernikahan. Mereka berdalil dengan hadis Ibnu Abbas yang berbunyi “janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya...” serta hadis riwayat Muslim bahwa “anak perempuan lebih berhak atas dirinya dari pada walinya..”. Dalil tersebut dijawab oleh Jumah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu al-Jauzy dalam hasil penelitiannya bahwa hadis Ibnu Abbas tersebut memang memberi hak bagi janda untuk memutuskan menerima pinangan/menikah di banding walinya, sebab bagi seorang wali tidak ada wewenang selain melangsungkan akad nikah/menikahkan saja, ia tidak boleh menikahkan si wanita tanpa izin darinya. Demikianlah yang diungkapkannya ketika mentakhrij kitab al-Hidayah karya al-Zaila’iy. Sehingga pendapat yang tepat adalah pernikahan tanpa wali hukumnya batil/tidak sah sebagaimana yang diinginkan oleh hadis yang dibahas.

Dari syarah hadis tersebut dapat disimpulkan intisari kandungan hadis di atas sebagai berikut:

1. Batalnya suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa izin atau kehadiran wali nasab dari mempelai wanita.
2. Adanya hak atas mahar bagi si wanita yang terlanjur dinikahi tanpa persetujuan walinya, meski status pernikahannya dianggap batal oleh syariat.

Apabila seorang wanita hendak menikah dan ia tidak memiliki wali nasab atau ada namun para wali tersebut enggan atau tidak

merestui maka hak perwalian beralih kepada penguasa, bukan kepada keluarga jauhnya.

Aktualisasi Hadis dalam Konteks Gorontalo

Penyebutan istilah “*sulthan*” dalam teks hadis di atas, yang berfungsi sebagai wali pengganti bagi mempelai wanita yang tidak memiliki wali nasab, jika di lihat dari konteks ke-Indonesia-an sesungguhnya yang dimaksud adalah kepala negara tertinggi yakni Presiden. Namun, adalah suatu hal yang memberatkan (mustahil) bagi seorang Presiden yang hanya manusia biasa untuk terjun langsung meladeni seluruh masyarakatnya yang ingin melangsungkan pernikahan mulai dari kota sampai ke pelosok daerah terpencil. Oleh karena itu, dalam KHI dijelaskan bahwa untuk menjalankan fungsi sebagai wali hakim, konstitusi memberi kuasa kepada pembantu Presiden yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada Kepala KUA di setiap kecamatan untuk melaksanakan tugas tersebut. Namun untuk teknis pelaksanaannya di lapangan Menteri Agama mengangkat masing-masing Pegawai Pencatat Nikah di setiap kecamatan untuk bertindak sebagai wali hakim sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di masing-masing wilayah di Indonesia.

Aturan teknis wali hakim tersebut tertuang dalam Bagian Pertama buku KHI pada pasal 1, redaksinya adalah:

“Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.

Meski aturan wali nikah telah diundangkan, namun masih dijumpai masyarakat yang berasumsi bahwa wali bukan elemen utama dalam pernikahan Islam. Mereka menganggap pernikahan tetap sah kalau dilangsungkan tanpa restu dan kehadiran wali dalam akad nikah. Akibatnya, muncullah beberapa praktik pernikahan tidak tercatat yang sering dijalankan oleh masyarakat muslim. Seperti kawin lari, nikah batin, atau bahkan ada yang sampai membuka jasa layanan nikah.

Provinsi Gorontalo sebagai daerah yang dikenal masyarakatnya sangat religius dan kental dengan nuansa adat istiadat dalam menjalani rutinitas kesehariannya, dikenal sebagai daerah yang masih banyak terjadi praktek layanan nikah tidak tercatat atau layanan jasa nikah tidak resmi. Baik yang dijalankan secara terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Tokoh bernama Nur Alinti disingkat NA (alm.) di kelurahan Siendeng Kecamatan Hulontalo yang dulu menjadi oknum yang sering didatangi oleh pasangan bermasalah sejak 1976. Sepeninggal NA, layanan tersebut dilanjutkan oleh anaknya bernama Syukri Alinti. Menurut data yang

dikemukakan oleh Ahmad Faisal dan Mahmud Bakari, Bapak dari Syukri Alinti tersebut telah menikahkan pasangan dari berbagai daerah dan latar belakang sosial tidak kurang dari 50 ribu pasangan.⁷⁴

Temuan tersebut relevan dengan data yang dikemukakan oleh Mansur Basir bahwa jumlah pasangan nikah yang tidak tercatat di Provinsi Gorontalo tahun 2014 sebanyak 9.626 pasang nikah yang tersebar di 6 (enam) kabupaten/Kota, dengan jumlah sebaran terbesar berada di Kabupaten Pohuwato sebanyak 4.305 pasang.⁷⁵

Selain itu, problem lain yang masih marak dijumpai pula adalah praktek nikah sirri yang dijalankan oleh masyarakat Kota Gorontalo. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Alinda Ahmad Ishak dan Muhibbuddin, bahwa di Kota Gorontalo selain ada pencatatan perkawinan secara normal ada juga yang melalui proses perkawinan sirri untuk selanjutnya melakukan permohonan *itsbat* nikah untuk disahkan perkawinannya. Data dari Pengadilan Agama Gorontalo yang yurisdiksinya mewilayahi seluruh wilayah Kota Gorontalo, sepanjang tahun 2017 menerima permohonan *itsbat* nikah sebanyak kurang lebih 102 perkara.⁷⁶

Meski pelaksanaan nikah sirri memenuhi semua rukun nikah dalam fikih, namun kehadiran praktek seperti ini melahirkan banyak dampak negatif dan kerugian bagi para pasangan nikah sirri. Aturan yang sudah ada dalam KHI yang mengikat seluruh umat Islam di Indonesia menjadi terabaikan dan melahirkan orang-orang yang tidak taat hukum. Dampak negatif lainnya adalah ruwetnya melacak dan memastikan berakhirnya masa iddah bagi wanita yang telah ditalak melalui sebuah pernikahan sirri. Demikian pula penjaminan hak-hak masing-masing pasangan ketika terjadi perceraian/putus dari pernikahan sirri. Belum lagi tidak adanya jaminan hak nafkah bagi anak, serta hak kewarisan akibat dari pernikahan tersebut serta banyak lagi yang lain.

Kondisi di atas mengindikasikan masih lemahnya kesadaran masyarakat Gorontalo tentang kedudukan dan peran penting wali

⁷⁴Ahmad Faisal dan Mahmud Bakari, *Layanan Nikah Tidak Tercatat di Gorontalo; Explorasi dan Rekonstruksi*, Jurnal Ilmiah “al-Jauhari”, Vol. 4, No. 1, Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2019, h. 221.

⁷⁵Mansur Basir, *Solusi Hukum Bagi Perkawinan Tidak Tercatat (Sirri)*, Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo, <https://gorontalo.kemenag.go.id/opini/260/solusi-hukum-bagi-perkawinan-tidak-tercatat-sirri>

⁷⁶Alinda Ahmad Ishak dan Muhibbuddin, *Pencatatan Perkawinan Lintas Kantor Urusan Agama Di Kota Gorontalo*, Jurnal al-Mizan, Vol. 15, No. 1, 2019, h. 58.

dalam pernikahan hingga diperlukan sosialisasi intensif kepada masyarakat mengenai aturan teknis pernikahan dalam hukum Islam khususnya aturan perwalian guna menciptakan tatanan kehidupan berkeluarga dan berketurunan yang transparan sesuai norma agama dan Negara. Ketaatan menjalankan petunjuk dan ajaran beragama haruslah sinergis dan berbanding lurus dengan kesadaran hukum dalam diri setiap masyarakat muslim di Indonesia bahwa wali tidak sekedar menjadi pelengkap dalam pernikahan tapi menjadi simbol perwakilan keluarga besar dari mempelai wanita untuk melakukan penyerahan/pengalihan tanggung jawab secara penuh secara formal dari pihak keluarga wanita kepada si calon suami guna membina, mengurus, menafkahi, dan melindungi hak-hak sang mempelai wanita di kemudian hari. Itulah mengapa sampai pernikahan harus atas izin, *taukil*, atau kehadiran wali dalam akad.

Hadirnya regulasi tentang pelaksanaan *itsbat nikah* oleh Pengadilan Agama serta langkah penggratisan biaya menikah jika dilakukan di KUA merupakan sebagian dari upaya pemerintah untuk mengantisipasi lemahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati ajaran agama dan Negeranya terkait regulasi pernikahan yang sah termasuk pentingnya wali dalam pernikahan.

Kesimpulan

Kandungan hukum yang terdapat dalam hadis wali menunjukkan batalnya suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa izin, *taukil* atau kehadiran wali. Kalaupun ada pernikahan yang berlangsung tanpa kehadiran wali, izin atau *taukil* darinya, pernikahan tersebut tidak menggugurkan hak wanita atas mahar meski status pernikahannya dikategorikan tidak sah atau batal oleh syariat dan hukum perundang-undangan. Jika petunjuk hukum dari hadis tersebut diaktualisasikan pada konteks pernikahan yang terjadi di Gorontalo menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran masyarakat Gorontalo tentang fungsi dan kedudukan wali dalam pernikahan masih sangat lemah. Masih banyaknya terjadi praktek layanan nikah tidak tercatat atau layanan jasa nikah tidak resmi, baik yang dijalankan secara terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi masih banyak ditemukan. Baik di Kota Gorontalo maupun di kabupaten. Demikian pula halnya dengan masih maraknya terjadi praktik nikah sirri di Kota Gorontalo yang secara konteks juga mengindikasikan lemahnya pengetahuan tentang pentingnya wali nikah.

Daftar Pustaka

- ‘Abdullāh, Abu Muhammad bin Ahmad bin ‘Utsmān al-Dzahabiy, *Siyar A’lām al-Nubalā’*, Cet. VII; Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1990.
- ‘Abdurrahmān, Jalāluddīn bin Abi Bakr al-Suyūthiy, *Tabaqāt al-Huffādzh*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983.
- Abdillāh, Abi Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubiy, *Al-Jami’ li Ahkāmī al-Qur’an*, Juz. 15, Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006.
- Abdoerraof, *Al-Qur’an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Abdullāh, Abu Muhammad bin Yazīd al-Qazwīniy, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz. 1, Kairo: Dār Ihyā’ al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.
- Abdullāh, Abu Ahmad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibāniy, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz. 4 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Abdullāh, Abu Muhammad bin Yazīd al-Qazwīniy, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz. 1 (Kairo: Dār Ihyā’ al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.
- Abdurrahmān, Abu bin Ali al-Khurasāniy al-Nasā’iy, *Sunan al-Nasā’iy*, Juz. 7, Cet. II; Halab: Maktab al-Mathbū’at al-Islāmiyyah, 1986.
- Abi al-Fadhil Jamal al-Dīn Muhammad ibn Muharram ibn Manṣūr, *Lisan al-‘Arab*, Jilid. XV, Beirut: Dār al-Ṣadir, t. th..
- Abu, Imam Abdillah Mohammad Idris al-Syafi’i, *al-Umm*, Jilid IV, t.t.: t.p., 1968.
- Ahmad, Alinda Ishak dan Muhibbuddin, *Pencatatan Perkawinan Lintas Kantor Urusan Agama Di Kota Gorontalo*, Jurnal al-Mizan, Vol. 15, No. 1, 2019.
- Ahmad, Syihābuddīn bin ‘Ali Ibn Hajar al-Asqalāniy, *Tahdzīb al-Tahdzīb*, Jilid. V, Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr li al-Thibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1984.
- al-Hajjāj, Muslim bin Abu al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisābūriy, *Shahīh Muslim*, Juz. 2, Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāts al-‘Araby, t.th.
- al-Husain, Abi bin Fāris bin Zakariyya, *Maqāyīs al-Lughah*, Juz. V (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), h. 141.
- Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- al-Jaziriy, Abd al-Rahman. *al-Fiqh ‘alā al-Madzāhib al-Arba’ah*, Juz. IV, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.

- al-Mahāsīn, Abi Muhammad bin Ali al-‘Alawiy al-Hāsyimiy, *Kitāb al-Tadzkirah bi Ma’rifati Rijāl al-Kutub al-Tis’ah*, Juz. 3, Cairo: Maktabah al-Khanjiy, t.th.
- Asyraf, Muhammad bin ‘Āmir bin Ali bin Haidar Abu Abdurrahmān Abbādiy, ‘*Aunu al-Ma’būd Syarah Sunan Abī Dāwūd*, Juz. 6, Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H.
- Basir, Mansur. *Solusi Hukum Bagi Perkwainan Tidak Tercatat (Sirri)*, Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo, <https://gorontalo.kemenag.go.id/opini/260/solusi-hukum-bagi-perkawinan-tidak-tercatat-sirri>
- Dāūd, Abu Sulaimān bin al-Asy’ats al-Sijistāni, *Sunan Abī Dāūd*, Juz. 2, Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, t.th.
- Dāwūd, Abu Sulaimān bin al-Asy’ats al-Sijistāniy, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz. 2, Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, t.th.
- Daud, Mohammad Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000, h. 13, 18, 20-22.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama R.I., 1999.
- Faisal, Ahmad dan Mahmud Bakari, *Layanan Nikah Tidak Tercatat di Gorontalo; Explorasi dan Rekonstruksi*, Jurnal Ilmiah “al-Jauhari”, Vol. 4, No. 1, Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2019.
- Gaffār, Abdul Sulaimān al-Bandariy dan Sayyid Kisrawy Hasan, *Mausū’ah Rijāl Kutubu al-Tis’ah*, Juz. 2, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- <https://muhandisun.wordpress.com/2013/04/28/ibnu-jurajj-rahimahullah/>, (diakses tgl 16 Oktober 2015).
- Isa, Muhammad bin Saurah bin Mūsā al-Tirmidziy, *al-Jāmi’ al-Kabīr Sunan al-Tirmīdziy*, Juz. 2, Beirut: Dār al-Garb al-Islāmiy, 1998.
- Mālik bin Anas bin Mālik al-Ashbahiy al-Madaniy, *Muwattha’*, Juz. 2, Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāts al-Arabiy, 1985.
- Muhammad, Abu Abdullāh bin Abdu al-Shamad al-Dārimiy, *Sunan al-Dārimiy*, Juz. 3, Cet. I; Saudi Arabia: Dār al-Mugniy li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2000.

- Mushthafa, Muhammad al-A'dzimi, *Dirāsāt fī al-Ahādīts al-Nabawiy wa Tārīkh Tadwīnih*, Juz. I, Makkah: al-Maktabat al-Islāmiy, 1992.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Ahmad Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2004.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985.
- Qayyim, Ibnu al-Jauziyyah, '*Aunu al-Ma'būd Syarah Sunan Abī Dāwūd*, Juz. VI, Cet. III; t.t.: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1979.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 4; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. V; Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 1986.
- Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Surabaya: Arkola, t.th), h. 13.